KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Aceh Dibolehkan Teken Perjanjian Dengan Asing
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2013
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

DPR Garap RUU Perjanjian Internasional

Aceh Dibolehkan Teken Perjanjian Dengan Asing

DPR tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk mengikat kerja sama dengan negara-negara di dunia.

"Jika RUU ini disahkan, maka kerja sama menyangkut pendidikan, dan ekonomi bisa langsung dilakukan Pemerintah Aceh dan tidak harus lagi bertanya ke pusat," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman di Banda Aceh, kemarin.

Dirinya yakin, rencana ini tidak akan menimbulkan konflik regulasi hingga proses pembuatan RUU tentang Perjanjian Internasional dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, penghormatan kepada kekhususan Aceh sebagai daerah berotonomi khusus itu penting agar masalah kecemburuan ekonomi tidak terulang lagi.

"Artinya UUPA sebagai kekhususan Aceh tidak diabaikan, apalagi sampai didustakan. Kita berharap tidak ada lagi dusta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh," tukasnya.

Dalam Pasal 9 UUPA disebutkan Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri. Hayono yang juga Ketua Delegasi Komisi I DPR dalam kunjungan ke Aceh itu menyatakan, cukuplah peritiswa turunnya Soeharto dan tsunami di Aceh sebagai peringatan bagi semua pihak. "Kalau kedua peristiwa itu tidak dianggap sebagai peringatan, maka khawatir peringatan lebih besar akan datang untuk bangsa ini," papar bekas Menpora itu.

Terpisah, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pelaksanaan otonomi daerah harus digunakan sebaik-baiknya untuk percepatan pembangunan. Dia berharap, dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti timbulnya konflik yang mengganggu kesatuan bangsa tidak akan terjadi.

"Otonomi daerah itu bagus kalau dikelola dengan benar dan jika ada niat baik serta idealisme. Jadi tidak bagus karena terjadi distorsi, ada distorsi kepentingan," kata Sjafrie dalam Diskusi Publik Nasional Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia di Gedung DPR, kemarin.

Bekas Pangdam Jaya ini meminta agar pelaksanaan otonomi itu dicermati. Ini bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena itulah, jangan sudah diberikan status otonomi terus-terusan minta keistimewaan lain.

"Yang harus dicermati sudah dikasih otonomi daerah minta otonomi khusus, terus minta simbol khusus. Otonomi khusus itu untuk menjaga kesatuan," tukasnya. ■ MRA